

0	8	0	2	0	6	0	1	0	9	0	2	0	1	6	3	<i>Sum</i>
Kode Fakultas	Kode PS/Bagian	Kode Publikasi	Kode Penulis	Tahun Publikasi	Kode Sumber Tulisan	Nomor urut Publikasi dari Fakultas										

Kerusakan Lingkungan dan Masalah Sampah dari Perspektif Teori Sosiologi

Oleh:
Alfitri

Dosen Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Abstract

In urban area, trash problem have complicated, not only about the quantity of trash more increase but also about the place as the end trash pound (TPA). Core trash problem is anthropocentrism which couch human being as the central point. To solve this problem isn't based on technical case but nontechnical case. This article suggested that to solve the problem can from many perspective, such as consensus theory, action theory, exchange theory and interactional symbolic theory.

Kata Kunci: Sampah, Antroposentrisme, Konsensus, Tindakan, Pertukaran, Simbolik

Latar Belakang

Di Indonesia, sampah telah menjadi persoalan serius yang identik dengan lingkungan perkotaan. Jumlah penduduk yang semakin tinggi, konsumsi masyarakat perkotaan yang melonjak, akibatnya produksi sampah meningkat tajam dari tahun ke tahun. Proses tersebut didukung oleh kultur masyarakat kota yang majemuk namun renggang, individualistik, dan masa bodoh terhadap lingkungan. Kondisi ini menjadi bagian dari kehidupan, terutama di kota besar. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, persoalan sampah sudah menjadi semakin kompleks dan rumit, tidak saja volume sampah yang makin besar, namun tempat pembuangan akhir (TPA) sampah menimbulkan persoalan baru, di mana masyarakat menolak kehadiran TPA dengan berbagai alasan, sehingga di beberapa kota besar kesulitan mencari TPA —Kasus kerusakan yang dilakukan warga sekitar TPA Bantargebang tanggal 10 De-

seMBER 2001, dan peristiwa longsornya timbunan sampah di TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005, serta masalah sampah di Kota Bandung yang tidak terangkut akibat penolakan masyarakat Desa Citatah terhadap TPA merupakan rentetan persoalan sampah yang rumit dan kompleks. Demikian pula dengan kultur masyarakat yang tidak tertib dalam membuang sampah, semakin menambah persoalan.

Salah satu contoh kasus, dapat dilihat dari produksi sampah di Jakarta setiap harinya mencapai 25.600 m³, atau setara dengan 6000 ton sampah. Dengan rincian 57% berasal dari rumah tangga, 30% dihasilkan dari pasar-pasar, dan 13% dihasilkan oleh industri, hotel dan restoran. Dari jumlah tersebut ditampung di TPA hanya 88% atau sekitar 22.500 m³, sisanya 3.150 m³ tidak terangkut, dan inilah yang menjadi sumber kerusakan lingkungan, terutama pencemaran baik sungai, selokan, tanah,

maupun udara yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah akan berdampak kepada eksistensi manusia, baik terhadap lingkungan yang nyaman sampai kepada ancaman penyakit yang ditimbulkan oleh sampah. Oleh sebab itu persoalan sampah harus dilihat sebagai masalah urgen dan perlu cari akar masalahnya dan solusinya.

Kerusakan Lingkungan dan Sampah

Akar persoalan yang paling dalam dan tersembunyi dalam masalah sampah adalah antroposentrisme, yakni melihat persoalan dengan mendudukan manusia sebagai sentral. Sesuatu yang disebut sampah atau bukan, sangat tergantung pada subyektivitas si manusia itu sendiri. Menurut Purwo Santosa (2005: 8) sampah bukanlah realitas obyektif, meski pada umumnya kotoran binatang identik dengan sampah, tak jarang kotoran binatang tersebut menjadi komoditi. Di toko tanaman hias kita harus membayar mahal untuk memperoleh pupuk yang berasal dari kotoran kambing. Begitu pula di mata para perajin, batang pisang yang biasanya diperlakukan sebagai sampah, justru dijadikan bahan baku membuat kerajinan tangan. Lebih dari itu, sejumlah seniman yang justru mendapatkan imbalan yang sangat tinggi dari kemampuannya menata berbagai onderdil bekas menjadi suatu patung yang dinilai seni tinggi.

Perbedaan pemahaman terhadap sampah akan dapat menimbulkan berbagai penafsiran, bisa positif bisa juga negatif. Artinya penafsiran tentang sampah bisa diarahkan kepada materi yang dapat dimanfaatkan dan mengun-

tungkan, bukan sebaliknya sebagai materi buangan. Persoalan sampah bukanlah dominasi masalah teknis semata, tetapi harus ditinjau dari dimensi lain, utamanya dimensi sosial budaya. Tulisan ini akan menyoroti persoalan kerusakan lingkungan dan masalah sampah dari berbagai perspektif yaitu teori konsensus, teori tindakan, teori pertukaran dan teori interaksi simbolik.

Teori Konsensus

Masalah sampah dapat dikaji melalui teori konsensus. Teori konsensus memandang bahwa nilai dan norma bersama sebagai hal yang esensial di masyarakat, memusatkan perhatian kepada keteraturan sosial berdasarkan atas kesepakatan diam-diam dan memandang perubahan sosial terjadi secara lambat dan teratur (Ritzer, 2004: 116). Dalam konteks permasalahan sampah, nilai dan norma bersama itu terwujud dari konsensus warga masyarakat yang sepakat untuk tidak melakukan tindakan pembuangan sampah secara sembarangan. Kesadaran bersama ini menurut Durkheim (dalam Campbell, 1994: 183) mengambil dari detail-detail tradisi religius dan praktik-praktik suku-suku untuk melukiskan bentuk-bentuk kehidupan spesifik dan komprehensif yang terkandung di dalam kesadaran kolektif masyarakat-masyarakat sederhana dan memiliki komitmen yang kuat namun emosional dari para anggotanya pada norma-norma sosial mereka bersama. Kesepakatan ini terbentuk melalui kesadaran bersama yang berangkat dari pemahaman bahwa sampah dapat merusak lingkungan dan berakibat buruk bagi kesehatan manusia.

tor memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya hidup bersih dan menjaga lingkungan yang nyaman agar terhindar dari berbagai ancaman bibit penyakit yang merugikan manusia. Nilai dan norma hidup sehat menjadi pemersatu bagi masyarakat secara bersama-sama menjaga lingkungan yang sehat dan nyaman untuk kepentingan bersama, sehingga sampah yang dihasilkan oleh masyarakat secara bersama-sama ditangani dan dikelola menjadi bahan yang dapat mempunyai nilai tambah bagi manusia.

Bisa jadi konsensus dilanggar oleh aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya, misalnya perilaku malas dapat menimbulkan tindakan yang dapat merugikan kesepakatan nilai yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga dalam praktiknya seringkali kesepakatan ini dilanggar oleh warga. Pada sisi ini akan timbul kesulitan untuk mencapai suatu keteraturan sosial seperti yang diharapkan dalam konsensus tersebut. Perbedaan kepentingan dan pemahaman terhadap sampah dapat melahirkan pelanggaran konsensus yang sebelumnya sudah disepakati sebagai nilai dan norma kolektif. Oleh karenanya untuk menjaga kesepakatan kolektif diperlukan struktur guna mempertahankan ikatan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang melarang membuang sampah sembarangan karena bisa dikenakan sanksi denda dan kurungan bagi warga yang melanggarnya. Akan tetapi jika Perda tidak dapat memaksa kesepakatan tersebut, maka akan timbul pengabaian terhadap nilai dan norma yang selama ini sudah disepakati, kondisi ini terjadi karena penerapan

Perda jarang diikuti dengan sanksi tegas dalam menegakkan aturan yang merupakan kesepakatan bersama secara tertulis.

Teori Tindakan

Dari perspektif teori tindakan, munculnya sampah dalam kehidupan manusia adalah karena adanya tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri. Weber (dalam Campbell, 1994: 205) menyarankan bahwa tindakan sosial sejauh berdasarkan atas makna subyektif yang melekat oleh individu yang bertindak, tindakan itu memperhitungkan tingkah laku orang-orang lain dan dengan cara itu pelaksanaannya terarah. Tindakan manusia yang melahirkan sampah harus dipahami sebagai suatu perilaku yang dibentuk secara normatif. Begitu pula tindakan manusia terhadap persoalan sampah juga harus dipahami sebagai perilaku yang bisa diarahkan untuk mencapai tujuan kebaikan bagi diri manusia itu sendiri. Salah satu pemikir tentang teori tindakan adalah Talcott Parsons. Parsons (dalam Beilharz, 2005: 293) mengemukakan teori tindakan voluntaristik, menurutnya tindakan adalah perilaku yang disertai aspek "upaya" subyektif dengan tujuan membawa kondisi-kondisi situasional, atau "isi kenyataan", lebih dekat pada keadaan yang ideal atau yang ditetapkan secara normatif.

Parsons juga mengangkat tentang proses siberetik mengenai arus informasi dan energi. Menurutnya tingkatan *siberetik* berada dalam empat tingkatan, yaitu tingkatan budaya (*institutionalisasi*), di mana nilai dilembagakan, kemudian tingkatan sosial (*sosialisasi*) yaitu pemberitahuan kepada masyarakat, se-

telah itu tingkatan individu (*internalisasi*) yaitu tahap penghayatan oleh individu, dan terakhir tingkatan organisasi perilaku, yaitu kontrol dan pengawasan bisa berupa sanksi-sanksi (Adiwikarta, 2006).

Dalam menjelaskan tentang permasalahan sampah, teori sibernetik Parsons, dapat digunakan untuk menanamkan kesadaran masyarakat agar bisa bertindak arief terhadap masalah sampah, setidaknya harus melalui empat tahapan yang ditawarkan Parsons. Pada tahap pertama, yaitu tahap institusionalisasi nilai-nilai yang berkenaan dengan baik buruknya sampah harus ditanamkan melalui struktur kelembagaan, bisa melalui keluarga, sekolah, maupun lembaga nonformal lainnya —Capra menekankan pentingnya ekoliterasi untuk membantu masyarakat agar mengerti dan sadar ekologi, serta lebih arif terhadap alam, salah satunya melalui institusi pendidikan. Kesadaran ekologis harusnya dipupuk sejak dini, sebab bila sudah sadar ekologi sejak dini, masyarakat yang arif terhadap lingkungan dan alamnya akan segera terwujud, termasuk terhadap persoalan sampah. Lihat Jurnal Balairung, 2006. Pada tahap kedua, dilakukan sosialisasi bagaimana pemahaman masyarakat terhadap baik-buruknya sampah. Pada tahap ini peran penyuluh dan peran tokoh masyarakat akan sangat efektif dalam menyebarkan nilai-nilai kepada masyarakat. Tahap ketiga, internalisasi, yaitu tahap penghayatan yang dilakukan kepada pada aktor (individu) guna memahami arti baik buruknya sampah bagi kehidupan manusia. Tahap terakhir, yaitu kontrol dan pengawasan yang harus diterapkan dan ditegakkan guna menjaga kesepa-

katan nilai yang sudah dipahami secara sama oleh masyarakat. Kontrol ini bisa berupa hukuman jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan. Penerapan hukuman seperti ini sering dilakukan oleh pemerintah dengan menugaskan salah satu instansi untuk mengontrol tindakan masyarakat terhadap masalah lingkungan. Hal ini belum menyentuh akar permasalahan, karena penanaman nilai bukan hanya terjadi melalui proses penegakan aturan (nilai dan norma), akan tetapi dapat dilakukan melalui gerakan penyadaran sejak usia dini. Contoh yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, yang berusaha membangun kesadaran ekologis masyarakat melalui pendidikan. Sejak sekolah dasar anak-anak sudah diajari pengetahuan ekologi seperti cara mengelola sampah yang ramah lingkungan dengan penggunaan kembali barang bekas dan proses daur ulang sampah. Cara ini termasuk dalam tahapan sibernetik yang ditawarkan dalam teori Parsons.

Permasalahan sampah yang sering terjadi di masyarakat adalah lemahnya implementasi tahapan-tahapan seperti yang ditawarkan dalam teori tindakan Parsons, sehingga arus informasi dan arus energi yang diharapkan dapat membentuk ketaatan bersama tidak bisa dicapai secara optimal. Artinya, pada saat sebuah peraturan tentang sampah diperkenalkan kepada masyarakat, ada beberapa tahapan (misalnya tahapan sosialisasi) yang belum berjalan baik, bahkan tidak dijalankan sama sekali. Hal ini justru dapat menimbulkan kesalahpahaman masyarakat dalam mengartikan peraturan tentang sampah. Aspek inilah yang justru menguatkan budaya anomali yang tidak diharapkan, sehingga yang

terjadi di masyarakat adalah budaya salah (membuang sampah sembarangan) justru dipandang sebagai nilai kebenaran karena lemahnya daya tekan dari aturan yang pada dasarnya lahir dari sebuah kesepakatan bersama.

Teori Pertukaran

Masalah sampah juga dapat dikaji melalui perspektif teori pertukaran. Dasar pertukaran menurut Homans adalah norma tidak secara otomatis memaksa, individu menyesuaikan diri, jika mereka berbuat demikian, karena mereka merasa mendapatkan keuntungan dengan menyesuaikan diri itu dan psikologilah yang menjelaskan pengaruh perilaku yang dianggap menguntungkan. Salah satu proposisi yang diajukan oleh George Homans dalam teori pertukaran adalah proposisi sukses (*The Success Proposition*). Menurut Homans (dalam Ritzer, 2004:361) untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan itu. Dalam konteks permasalahan sampah dapat dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan para pemulung yang memanfaatkan sampah guna memperoleh keuntungan, seringkali diulangi karena merasa memperoleh sesuatu (nilai tambah) dari tindakannya. Pemulung mengelola sampah karena memiliki keuntungan ekonomis sebagai sumber penghasilan mereka. Sebaliknya bagi warga yang tidak memperoleh manfaat dari nilai sampah justru akan membiarkan sampah berserakan tanpa ada tindakan untuk membersihkan sampah, kecuali jika warga memperoleh tindakan pemaksaan melalui hukuman seperti yang

dijelaskan Homans dalam proposisi tentang nilai.

Homans (dalam Ritzer, 2004: 364-365) juga mengemukakan proposisi nilai yaitu makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu. Di sini Homans memperkenalkan konsep hadiah dan hukuman. Hadiah adalah tindakan dengan nilai positif; makin tinggi nilai hadiah, makin besar kemungkinan mendatangkan perilaku yang diinginkan, sedangkan hukuman adalah tindakan dengan nilai negatif; makin tinggi nilai hukuman berarti makin kecil kemungkinan aktor mewujudkan perilaku yang tak diinginkan. Di sini aktor akan cenderung mempertahankan perilaku untuk tidak membuang sampah sembarangan karena pemaksaan melalui hukuman yang dijatuhkan kepada aktor yang melanggar. Bagi warga yang mendapatkan hukuman, maka kecil kemungkinan warga akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan pemberian hadiah bagi aktor yang tidak melakukan tindakan membuang sampah, maka akan cenderung diulangi tindakan yang mengarahkan sampah ke tempat pembuangan yang telah disediakan.

Permasalahan sampah timbul karena aktor seringkali tidak mendapatkan hadiah bagi tindakan yang selama ini dilakukan, begitu juga tindakan membuang sampah sembarangan cenderung dilakukan karena tidak pernah memperoleh hukuman dari tindakan yang selama ini dilakukan. Jarang sekali dilakukan pemberian hadiah bagi orang yang secara disiplin membuang sampah pada tempatnya. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum melalui peraturan

daerah menjadi sumber permasalahan. Seringkali denda yang tertera dalam peraturan daerah (Perda) sulit diimplementasikan di lapangan, karena berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum oleh aparat (Pol. PP) dan rendahnya budaya tertib dalam membuang sampah. Dampaknya adalah sampah semakin sulit dikendalikan, sehingga menjadi persoalan serius pada saat volume sampah makin besar dan pengelolaan sampah ditingkat produsen tidak diantisipasi dengan baik.

Interaksi Simbolik

Masalah sampah juga bisa dianalisis melalui perspektif teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah interaksi dengan menggunakan simbol-simbol, yaitu obyek sosial yang disetujui orang-orang untuk mempresentasikan atau menggantikan sesuatu yang lain. Simbol bisa berupa benda, gerak atau isyarat atau kata-kata. Bahasa merupakan simbol paling penting karena memberikan pemahaman yang sama kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Adiwikarta, 2006). Salah satu pemikir interaksionisme simbolik adalah William Thomas (dalam Adiwikarta, 2006) yang mengemukakan tiga pokok pikirannya, yaitu perilaku seseorang tergantung pada defenisi situasi yang diberikan, relativisme adalah situasi yang berbeda punya makna berbeda bagi orang yang berbeda, defenisi situasi itu subyektif dan berubah, dan dalil Thomas, kalau orang mendefenisikan situasi sebagai riil, maka riil pula konsekuensinya. Pemaknaan terhadap situasi yang berbeda tentang sampah akan melahirkan perbedaan perlakuan terhadap sampah yang dilakukan oleh manusia.

Sebagai sebuah tanda sosial, sampah memiliki nilai makna yang luas bagi masyarakat, baik dari sisi material maupun sosial. Sampah dapat diterjemahkan sebagai sebuah tanda sosial yang sarat dengan makna untuk kemudian direnungkan bersama oleh warga masyarakat. Dengan memahami atau mendefinisikan sampah dalam konteks kehidupan manusia, maka akan dapat dirumuskan mengenai apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap sampah itu sendiri (Sudarma, 2005). Kalangan ekologi menunjukkan adanya potensi ekologis dari sampah yaitu dikembangkan sebagai kompos. Teknologi pengomposan merupakan salah satu alternatif mengenai proses pemberdayaan sampah sebagai bahan pupuk bagi pertanian. Artinya melalui sedikit teknologi, sampah sudah berpindah posisi statusnya, dari posisi takdir material, berubah menjadi posisi sebagai bahan dasar kompos untuk kebutuhan pertanian.

Kalangan pemulung akan lain lagi dalam memandang dan memaknai sampah. Mereka akan bahagia dengan adanya sampah, karena disanalah mereka akan mendapatkan "pekerjaannya." Realitas ini memberikan sebuah ketegasan bahwa sampah adalah teman hidupnya dan pekerjaannya yang dapat memberi nilai tambah dan menghasilkan komoditi yang bernilai ekonomis. Dengan sampah itulah mereka bisa mempertahankan hidup dan menafkahi keluarganya.

Pada umumnya sebagian besar masyarakat masih memaknai sampah sebagai materi yang tak terpakai, sehingga sampah hanya benar-benar diposisikan sebagai takdir material yang selalu diakhir dengan kata "buang".

Pemaknaan situasi sampah yang demikian patut diubah dalam kerangka untuk menangani persoalan sampah yang semakin hari membuat pusing para pengambil kebijakan terutama diperkotaan. Sampah sudah sewajarnya dimaknai sebagai materi yang bernilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, serta dapat memberikan nilai tambah. Persoalan sampah pada dasarnya adalah persoalan *judgement*. Suatu benda yang kita sebut sebagai sampah karena kita melakukan judgement bahwa sesuatu itu tidak bernilai. Sepanjang benda tersebut dianggap tidak bernilai maka benda tersebut tetap berstatus sampah. Padahal sebenarnya sampah mempunyai nilai simbolik kemewahan yang mampu mempresentasikan kelas sosial pada pengguna. Sayangnya hal tersebut hanya diketahui para pemulung yang kecil, compang-camping dan jauh dari gemuruh riuh pelaku konsumsi.

Salah satu contoh kekuasaan simbolik adalah munculnya kata "*Jangan buang sampah sembarangan*" atau "*buanglah sampah pada tempatnya*". Kata ini merupakan bentuk anjuran atau perintah yang sifatnya hierarkhis, namun dikeluarkan ketika telah terlanjur terjadi konsumsi. Anjuran ini cenderung berhenti pada membuang sampah semata sebagai bentuk disiplin diri dari penguasa simbolik yang harus dijalankan oleh warga sebagai pelaku. Sebaiknya tidak hanya makna simbolik mengenai anjuran, akan tetapi bagaimana mengemas makna simbolik bagi kegunaan sampah untuk kehidupan manusia, agar makna sampah tidak dikonotasikan sebagai materi yang harus dibuang, akan tetapi bagaimana mengubah makna sampah

sebagai materi yang harus diolah menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai.

Penutup

Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari tulisan ini adalah, konsensus secara kolektif akan muncul dengan sendirinya jika para aktor memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya hidup bersih dan menjaga lingkungan yang nyaman agar terhindar dari berbagai ancaman bibit penyakit yang merugikan manusia.

Permasalahan sampah yang sering terjadi di masyarakat adalah lemahnya implementasi tahapan-tahapan seperti yang ditawarkan dalam teori tindakan Parsons, sehingga arus informasi dan arus energi yang diharapkan dapat membentuk ketaatan bersama tidak bisa dicapai secara optimal.

Tindakan yang dilakukan para pemulung yang memanfaatkan sampah guna memperoleh keuntungan, seringkali diulangi karena merasa memperoleh sesuatu (nilai tambah) dari tindakannya. Sebaliknya bagi warga yang tidak memperoleh manfaat dari nilai sampah justru akan membiarkan sampah berserakan tanpa ada tindakan untuk membersihkan sampah, kecuali jika warga memperoleh tindakan pemaksaan melalui hukuman

Masyarakat masih memaknai sampah sebagai materi yang tak terpakai, sehingga sampah hanya benar-benar diposisikan sebagai takdir material yang selalu diakhir dengan kata "buang". Makna simbolik bagi kegunaan sampah untuk kehidupan manusia perlu diubah dengan konotasi materi yang harus diolah menjadi materi yang bernilai bagi kehidupan manusia.

Daftar Pustaka

Adiwikarta, Soedardja. 2006. *Bahan Kuliah Kapita Selekta Sosiologi*. Tidak Diterbitkan.

Beilharz, Peter. 2005. *Teori-teori Sosial*. (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*. (Terjemahan). Yogyakarta: Kanisius.

Hasanuddin, Didin. 2005. *Mencermati Rencana Pembangunan TPA di Cibatatah*. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/19/0802.htm>

Jurnal *Balirung* Edisi 39 I Tahun XX I 2006. Yogyakarta: Badan Penerbitan Pers Mahasiswa UGM.

Kasriadi, Andang. 2006. TPA Sampah dan Pemberdayaan Masyarakat. *Harian Kompas*, Rabu 28 Juni 2006.

Keraf, Sonny A. 2001. Darurat Sampah DKI Jakarta. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0112/18/metro/daru17.htm>

Sudarma, Momon. 2005. Sampah, Tanda Sosial dan Nalar Kita. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/03/0802.htm>

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. (Terjemahan). Jakarta: Prenada Media.